

**KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
DALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI
KABUPATEN MINAHASA PROVINSI SULAWESI UTARA**

Estovel Bintang Samuel Korompis
NPP.30.1274

*Asdaf Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara
Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah*

Email:

estovelkorompis@gmail.com

ABSTRACT

Background: *The researcher focuses on the problem, namely that there are still villages that are late in submitting accountability reports on the implementation of the APB Desa in Minahasa Regency. The delay in submitting the accountability report indirectly had an unfavorable effect on the performance of the village government and the Minahasa District government in terms of orderly administration of government, and also hampered further accountability to the central government. To overcome this, good performance is needed from the Community and Village Empowerment Service (DPMD) as an agency that has the task of managing village government affairs and is authorized to provide guidance and supervision of village financial management in Minahasa Regency.* **Purpose:** *The purpose of this study was to find out and analyze the performance of the Community and Village Empowerment Service (DPMD) in fostering and supervising village financial management in Minahasa Regency, North Sulawesi Province, knowing and analyzing the supporting factors and inhibiting factors of the Community and Village Empowerment Service (DPMD) performance in fostering and supervising village financial management in Minahasa District, North Sulawesi Province, identifying and analyzing efforts to overcome the inhibiting factors for the performance of the Community and Village Empowerment Service (DPMD) in fostering and supervising village financial management in Minahasa District, North Sulawesi Province.* **Method:** *The research method in this study uses qualitative methods through descriptive research with an inductive approach. Data collection techniques in this study were carried out through interviews, observation, and documentation.* **Results/Findings:** *The availability of programs, budgets, human resources and supporting facilities for fostering and supervising village financial management is still very limited and has not been fully fulfilled causing obstacles to the performance of the Minahasa Regency Community and Village Empowerment Service (DPMD) so that its performance still needs to*

be improved. **Conclusion:** The results in this study illustrate that the performance of the Minahasa Regency Community and Village Empowerment Service (DPMD) has been implemented and is running well but still needs to be improved. The supporting and inhibiting factors influencing the performance of the Community and Village Empowerment Office (DPMD) of the Minahasa Regency are internal and external. Efforts made by the Community and Village Empowerment Service (DPMD) of Minahasa Regency to overcome the inhibiting factors are internal and external.

Keywords: Performance, Guidance and Supervision, Village Financial Management

ABSTRAK

Latar Belakang: Peneliti berfokus pada permasalahan, yaitu masih ditemukannya desa-desa yang terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa di Kabupaten Minahasa. Keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban tersebut secara tidak langsung memberikan pengaruh kurang baik terhadap kinerja pemerintah desa maupun pemerintah Kabupaten Minahasa dalam hal tertib administrasi pemerintahan, dan juga menghambat pertanggungjawaban selanjutnya ke pemerintah pusat. Untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan kinerja yang baik dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) sebagai instansi yang memiliki tupoksi mengatur urusan pemerintahan desa serta berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Minahasa. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, mengetahui dan menganalisis upaya mengatasi faktor penghambat kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara. **Metode:** Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui penelitian deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Ketersediaan program, anggaran, sumber daya manusia dan fasilitas pendukung pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa yang masih sangat terbatas dan belum sepenuhnya terpenuhi menyebabkan adanya hambatan pada kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Minahasa sehingga kinerjanya masih perlu ditingkatkan. **Kesimpulan:** Hasil dalam penelitian ini menggambarkan bahwa kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

(DPMD) Kabupaten Minahasa sudah dilaksanakan dan berjalan dengan baik namun masih perlu ditingkatkan. Faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Minahasa bersifat internal dan eksternal. Upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Minahasa mengatasi faktor penghambat adalah bersifat internal dan eksternal.

Kata Kunci: Kinerja, Pembinaan dan Pengawasan, Pengelolaan Keuangan Desa

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan bagian dari *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik) yang mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal tersebut bersesuaian dengan asas pengelolaan keuangan desa yang disebutkan pada Pasal 2 ayat (1) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yaitu “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.” Tahap pertanggungjawaban merupakan tahap akhir pengelolaan keuangan desa yang bertujuan untuk menyampaikan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu periode tahun anggaran. Selain itu, pertanggungjawaban keuangan desa bertujuan juga untuk mengetahui tingkat efektivitas, efisiensi, dan kemanfaatan pengelolaan sumber daya ekonomi oleh desa dalam 1 (satu) tahun anggaran, mengetahui nilai kekayaan desa secara lebih bersih dan rinci sampai posisi terakhir penyampaian laporan pertanggungjawaban, sebagai alat evaluasi terhadap kinerja aparatur pemerintah desa, sebagai sarana atau bentuk pengendalian terhadap peluang terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan pengelolaan keuangan desa, dan sebagai bentuk implementasi asas transparansi dan akuntabilitas seperti yang diatur dalam undang-undang. Salah satu permasalahan yang masih ditemukan dalam pengelolaan keuangan desa, yaitu adanya desa yang masih mengalami hambatan dalam proses penyampaian pertanggungjawaban keuangan desa. Hambatan tersebut menyebabkan terjadinya keterlambatan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa. Rafsanjani & Cheisviyanny (2021) mengemukakan dalam jurnalnya tentang analisis keterlambatan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes (Nagari) (Studi Kasus pada Kabupaten Pasaman Barat) bahwa hambatan yang dialami pemerintah desa (nagari) dalam tahap pelaporan dan pertanggungjawaban realisasi APBDes diantaranya disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia yang kurang memadai dalam melaporkan pertanggungjawaban realisasi APBDes, terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelaporan pertanggungjawaban realisasi APBDes,

pengendalian internal yang belum efektif, dan adanya ketidakpahaman aparaturnya perangkat desa terhadap peraturan yang berlaku yang sering tidak konsisten karena mengalami perubahan demi perubahan. Masih ditemukannya desa-desa yang terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan desa di Kabupaten Minahasa merupakan masalah yang perlu diatasi oleh pemerintah guna mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang tertib dan sesuai dengan asas-asas pengelolaan yang berlaku.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Permasalahan yang berkaitan dengan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Minahasa adalah adanya desa-desa yang masih terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan desa. Berdasarkan data pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa tahun 2022, penyampaian pertanggungjawaban keuangan desa oleh pemerintah desa pada tahun 2019-2021 dalam kategori terlambat. Dari jumlah total sebanyak 227 desa di Kabupaten Minahasa, penyampaian pertanggungjawaban keuangan desa pada tahun 2019 dan 2020 semua desa terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa. Selanjutnya pada tahun 2021, dari total 227 desa yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban hanya 34 desa yang tepat waktu dan sisanya sebanyak 193 desa terlambat. Keterlambatan pertanggungjawaban keuangan desa yang disampaikan melalui laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa merupakan masalah yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban tersebut secara tidak langsung dapat memberikan pengaruh kurang baik terhadap kinerja pemerintah desa maupun pemerintah Kabupaten Minahasa dalam hal tertib administrasi pemerintahan, dan juga menghambat pertanggungjawaban selanjutnya ke pemerintah pusat. Hal tersebut menggambarkan bahwa jumlah desa yang terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawabannya lebih banyak dibandingkan jumlah desa yang tepat waktu. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Minahasa sebagai instansi yang memiliki tupoksi mengatur urusan pemerintahan desa serta berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Minahasa harus dapat mengatasi permasalahan tersebut guna mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang sesuai dengan asas-asas yang berlaku serta terwujudnya tertib pertanggungjawaban keuangan desa di Kabupaten Minahasa.

1.3. Penelitian Terdahulu

Peneliti mengambil beberapa penelitian sebelumnya sebagai dasar atau pedoman untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian oleh Taek dkk (2020) yang berjudul Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang fokus penelitiannya untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat melalui penggunaan dana desa. Selanjutnya, penelitian oleh Prasetyo (2020) yang berjudul Peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian yang bersifat kualitatif ini berfokus pada pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya, penelitian oleh Andy Sofian Sinuhaji (2019) tentang Peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Upaya Meningkatkan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Karo. Penelitian kualitatif ini memiliki fokus penelitian pada upaya meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan APB Desa. Penelitian oleh Rafsanjani & Cheisvianny (2021) tentang Analisis Keterlambatan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes (Nagari) (Studi Kasus pada Kabupaten Pasaman Barat) (2021). Selanjutnya, penelitian oleh Liando dkk (2017) tentang Analisis Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian-penelitian terdahulu diatas memiliki keterkaitan masalah dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Namun, penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya dengan mengambil fokus permasalahan pada pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara dengan menggunakan teori pengukuran kinerja oleh Mahsun (2006). Kinerja DPMD yang baik dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa diharapkan dapat mendorong terwujudnya asas-asas pengelolaan keuangan desa serta tertibnya pertanggungjawaban keuangan desa di Kabupaten Minahasa.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui dan menganalisis Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, Mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Pembinaan dan Pengawasan

Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, Mengetahui dan menganalisis upaya-upaya mengatasi faktor-faktor penghambat Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara.

II. METODE

Simangunsong (2017:191) mengemukakan bahwa ada beberapa ciri khusus yang dapat menjelaskan kerangka kerja penelitian kualitatif, yaitu: (1) Penelitian kualitatif menggunakan lingkungan alamiah, dimana penelitian dilakukan pada situasi alamiah dalam suatu keutuhan agar sumber data yang di dapat secara langsung bersifat naturalistik, tidak manipulative dan terbuka pada apapun yang timbul kedepannya; (2) Manusia atau peneliti sendiri sebagai alat pengumpulan data yang utama; (3) Analisis data kualitatif bersifat induktif karena harus mengacu pada temuan di lapangan, sehingga mau tidak mau peneliti kualitatif harus melengkapi diri dengan peralatan perekam atau video handycam dan sejenisnya; (4) Teori yang dikembangkan bersifat grand theory yang artinya teori yang dikembangkan tersebut muncul dari bawah ke atas (bukan dari atas ke bawah) dan dibangun dengan bukti atau data yang saling berhubungan; (5) Data penelitian kualitatif bersifat deskriptif yang artinya data yang dikumpulkan dapat berupa kata-kata yang tertuang dalam transkrip wawancara yang didukung oleh catatan lapangan, gambar yang dihasilkan fotografi, video handycam, dokumen pribadi bersifat elektronik, memo-memo pendukung, dan rekaman-rekaman resmi lainnya. Intinya data penelitian kualitatif bukanlah angka-angka atau hasil reduksi data ke dalam symbol numerik; (6) Penelitian kualitatif bersifat subyektif yang artinya hasil kajian pada satu fokus dan lokus yang sama akan bersifat subyektif dan tidak bisa digeneralis ke fokus dan lokus yang lainnya, dan penelitian kualitatif lebih mementingkan proses daripada hasil; (7) Mendalamnya penelitian kualitatif terkadang mendorong peneliti untuk melakukan pembatasan pada fokus penelitian yang timbul sebagai masalah dalam penelitian; (8) Penelitian kualitatif juga memiliki kriteria khusus untuk keabsahan data baik validitas, reliabilitas dan objektivitas dalam bentuk triangulasi data (check, re-check dan cross check); (9) Desain penelitian kualitatif bersifat sementara dan terus berkembang sesuai dengan kondisi di lapangan; (10) Hasil penelitian kualitatif yang sempurna agar dirundingkan dan disepakati bersama antar peneliti dengan sumber data.

Menurut Hasan (2011:174), “Pendekatan induktif dimulai dari fakta di lapangan, dianalisis, dibuat pertanyaan kemudian dihubungkan dengan teori, dalil, hukum yang sesuai kemudian pernyataan hingga kesimpulan.” Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa pendekatan induktif adalah pendekatan

yang berasal dari fakta dan keadaan sebenarnya yang terjadi dilapangan yang kemudian dianalisis oleh peneliti untuk dibuatkan pertanyaan yang dikaitkan dengan teori dan hukum yang sesuai untuk penarikan kesimpulan.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti menggunakan metode kualitatif melalui penelitian deskriptif dengan pendekatan induktif untuk meneliti dan mengolah laporan penelitian guna menjelaskan dan mendeskripsikan secara faktual terkait Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara diteliti dan dianalisis oleh peneliti menggunakan teori dan konsep Kinerja menurut Mahsun (2006:31) yang meliputi 6 dimensi kinerja, yaitu Masukan (Input), Proses (Process), Keluaran (Output), Hasil (Outcome), Manfaat (Benefit), dan Dampak (Impact). Berikut ini merupakan pembahasannya:

3.1. Masukkan (*Input*)

Masukkan (*Input*) dalam hal ini meliputi ketersediaan program, anggaran, sumber daya manusia, dan fasilitas pendukung pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh DPMD Kabupaten Minahasa. Hasil yang diperoleh dalam dimensi ini adalah DPMD Kabupaten Minahasa memiliki program pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa, namun masih terbatas pada kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan desa. Terbatasnya program tersebut dipengaruhi juga oleh terbatasnya ketersediaan anggaran yang ada pada DPMD Kabupaen Minahasa. Selanjutnya, DPMD Kabupaten Minahasa sudah memiliki sumber daya manusia yang memadai, namun masih terbatas dan belum memiliki pegawai yang berspesifikasi khusus dalam pengukuran spesifikasi bangunan. Selanjutnya, DPMD Kabupaten Minahasa belum memiliki fasilitas pendukung yang secara langsung mendukung pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa karena selama ini belum diatur dan hanya terbatas pada pelaksanaan tupoksi dinas.

3.2. Proses (*Process*)

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemgelolaan keuangan desa oleh DPMD Kabupaten Minahasa sudah dilakukan sesuai dengan regulasi dan peraturan yang berlaku. Secara umum, pembinaan dan pengawasan tersebut sudah sesuai

dengan capaian program dan target yang telah ditetapkan DPMD Kabupaten Minahasa

3.3. Keluaran (*Output*)

Adanya pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh DPMD berpengaruh terhadap tersedianya dokumen pertanggungjawaban keuangan desa yang disampaikan oleh pemerintah desa kepada DPMD Kabupaten Minahasa.

3.4. Hasil (*Outcome*)

Adanya pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh DPMD Kabupaten Minahasa memberikan pengaruh terhadap terwujudnya transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta tertib dan disiplin anggaran terhadap dokumen pertanggungjawaban keuangan desa.

3.5. Manfaat (*Benefit*)

Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh DPMD Kabupaten Minahasa memberikan pengaruh kepada pemerintah desa untuk mewujudkan asas-asas pengelolaan keuangan desa terhadap pelaksanaan sampai pertanggungjawaban keuangan desa.

3.6. Dampak (*Impact*)

Pembinaan dan pengawasan oleh DPMD Kabupaten Minahasa berpengaruh terhadap terwujudnya pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat, namun belum mampu mewujudkan tertib pertanggungjawaban keuangan desa di Kabupaten Minahasa.

3.7. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara sudah terlaksana dan berjalan dengan baik namun masih perlu ditingkatkan. Hal tersebut disebabkan oleh masih adanya keterbatasan-keterbatasan pada program, anggaran, sumber daya manusia (pegawai), dan fasilitas pendukung pada DPMD Kabupaten Minahasa. Salah satu akibat dari adanya keterbatasan tersebut, yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa belum mampu mewujudkan tertib pertanggungjawaban keuangan desa di Kabupaten Minahasa. Hal tersebut menyebabkan kinerja DPMD dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Minahasa masih perlu ditingkatkan.

IV. KESIMPULAN

Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara dapat dikatakan sudah baik namun masih perlu ditingkatkan karena adanya keterbatasan-keterbatasan yang ditemukan melalui teori pengukuran kinerja oleh Mahsun. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat kinerja DPMD tersebut bersifat internal dan eksternal. Upaya yang dilakukan oleh DPMD Kabupaten Minahasa untuk mengatasi faktor penghambat dilakukan melalui upaya langsung internal dan eksternal.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan pada waktu dan biaya penelitian yang menyebabkan belum semua informan yang ditentukan dapat diwawancarai. Keterbatasan tersebut membuat skripsi ini belum sepenuhnya sempurna sehingga perlu adanya masukan dan saran dari berbagai pihak lainnya.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*): Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam meningkatkan pengawasan dan pembinaan pengelolaan keuangan desa, serta melalui penelitian ini peneliti mengharapkan adanya pengembangan penelitian-penelitian baru yang mengacu pada penelitian ini.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa yang telah bersedia menjadi lokasi penelitian peneliti yang sangat antusias mendukung peneliti selama melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang telah membantu dan mendorong peneliti menyelesaikan proses penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Hasan, E. (2011). *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian Ilmu Pemerintahan*. Bogor: Ghaila Indonesia.
- Mahsun, M. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPF-YOGYAKARTA.
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Sinuhaji, A. S. (2019). Peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa di Kabupaten Karo.

Taek, M. M., Wasistiono, S., & Meltarini, M. (2020). KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DALAM MEWUJUDKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN BELU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR. *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)*, 83-102.

Prasetyo, P. (2020). *Peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hulu* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

Rafsanjani, N., & Cheisviyanny, C. (2021). Analisis Keterlambatan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes (Nagari): Studi Kasus pada Kabupaten Pasaman Barat. *JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI*, 3(1), 12- 31.

Liando, L. Y., Lambey, L., & Wokas, H. R. (2017). Analisis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kolongan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2).

